

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ishak dan Efendi. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Ruba'i, Masruchin. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sutardjo, Maftuh Rachmat Prio. 2020. *Peran Layanan Hukum Pidana dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi Pada Hak Prerogatif Presiden*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.

Sofyan, Andi Muhammad dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

B. Jurnal:

Alam, Sumarni. 2017. Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik* 5(2).

Baital, Bachtiar. 2014. Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Humum* I(1).

Fauzi, Suyogi Imam. 2021. Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51(3).

Hananto, Untung Dwi. 2013. Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945. *MMH* 42(2).

Iqsandri, Rai dan Andrew Shandy Utama. 2021. Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. *Eksiklopedia Social Review* 3(2).

Kurniawan, Eka Chandra. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana dalam Pemberian Grasi. *Lex Administratum* III(1).

Kawengian, Kalfien M. 2016. Permohonan Grasi Oleh Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. *Lex Administratum* IV(3).

Kapugu, Glendy. 2016. Wewenang Presiden Terhadap Permohonan Grasi dari Terpidana. *Lex Privatum* IV(3).

Landung, Delliana Merli, Donald A. Rumokoy dan J. Ronald Mawuntu. 2020. Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum* VIII(4).

Makawimbang, Rezha Donald. 2013. Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi. *Lex Administratum* I(2).

Maramis, Adrian. 2019. Pemberian Grasi dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia. *Lex et Societatis* VII(7).

- Nou, Astuty R. 2016. Hak Terpidana Mati dalam Mengajukan Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. *Lex et Societatis* IV(2).
- Padmawati, Laelly Marlina. 2013. Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan. *Recivide* 2(3).
- Pratama, Yogi Wirawan Alif. 2016. Kewenangan Presiden Terhadap Permohonan Grasi serta Penerapannya dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis* IV(7).
- Rakhman, Darull, Asmara Budi Dyah D. S., dan Rosita Indrayati. 2013. Analisis Yuridis Pengujian Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* I(1).
- Rantung, Bobby. 2016. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba. *Lex Privatum* IV(4).
- Risal, Chaerul. 2017. Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Jurisprudentie* 4(2).
- Rofiq, Nur dan Sigit Tri Utomo. 2019. Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3(1).
- Suharti, Titik. 2005. Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. *PERSPEKTIF* X(3).
- Saraswati, Putu Sekarwangi. 2015. Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi* 5(2)
- Sukardi, Jilmi L. A. 2018. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum* VI(4).
- Wangkil, Jesica Pricillia Estefin. 2017. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP. *Lex Administratum* V(2)

C. Skripsi/Tesis:

- Azizah, Wilda. 2015. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Aldianto, Muhammad Renno. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN). *Skripsi*. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Jushak, Muh Ifraj. 2022. Tinjauan yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Skripsi*. Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Marthalia, Suci Putri. 2011. Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
- Putra, Bilmard Bikmanto. 2013. Penulisan Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Korupsi Syaikani Hasan Rais (Studi Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 2010). *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Raftanzani, Anshari. 2016. Pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara UU No. 5 Thn. 2010 tentang Grasi dan Hukum Islam). *Tesis*. Sumatra Utara: Pascasarjana Universitas Islam Negeri.
- Sumarsono, Bagus. 2019. Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Magelang. *Skripsi*. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Suhaina. 2023. Pemberian Grasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. *Skripsi*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Ula, Syukrian Rahmatul. 2021. Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor I/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyu, Muh. 2020. Eksistensi Nilai-nilai Kebudayaan (Studi Fenomenologi Masyarakat Pulau Barrang Lompo Kota Makassar). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.